

BAB III. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI BUDAYA LOKAL

**Thriwaty Aرسال¹, Dewi Liesnoor Setyowati², Puji Hardati²,
Hamdan Tri Atmaja³**

¹Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS, Universitas Negeri
Semarang

²Jurusan Geografi FIS, Universitas Negeri Semarang

³Hamdan Tri Atmaja, ⁴Jurusan Sejarah FIS, Universitas Negeri
Semarang

thriwaty_arsal@mail.unnes.ac.id; liesnoor@yahoo.co.id;
datie58@yahoo.com; atmaja.hta@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.15294/ka.v1i1.84>

Abstrak

Persepsi konflik semakin berkembang, dari yang ringan kategori berat. Konflik ringan dapat berbentuk hal yang kontradiktif, bersinggungan, berseberangan, konflik ringan berupa persengketaan, konflik berat berupa pertikaian, kekerasan, dan perang. Konflik tidak lebih dari karakter kehidupan yang sering muncul dalam proses sosial manusia. Proses interaksi antar manusia menuntun pada realitas konflik, yang setiap inci dapat terjadi gesekan, benturan, pertentangan, atau pertikaian, dan bahkan perang. Konflik dalam pengertian ringan dapat berfungsi positif, sedangkan jika sudah menjurus pada kekerasan, atau perang konflik memiliki konotasi negatif, oleh karena itu harus ada upaya yang tepat, dan akurat untuk menyelesaikan konflik agar tidak menambah korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat organisasi kepemudaan yang ada di Desa Cikeusal Kidul selain karang taruna desa yaitu IPNU-IPPNU. Organisasi ini memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat bagi anggota serta masyarakat Cikeusal Kidul, mulai dari marhaban keliling mingguan, rapat triwulan, rutinan tahunan, dan pengamanan masyarakat. Organisasi ini memiliki peran yang dalam terciptanya perdamaian antara desa Cikeusal Kidul dan Cikeusal Lor. Adanya organisasi semacam ini dapat membuat warga menjadi lebih produktif dan berminat sehingga dapat meminimalisasi konflik yang terjadi pada antar desa tersebut.

Kata kunci: Budaya Lokal, Ketahanan, Konflik, Karakter

PENDAHULUAN

Konflik adalah sesuatu yang *inheren* dalam kehidupan manusia, dan selalu mengiringi dimana manusia berada, kepentingan, serta nafsu menuntun pada realitas manusia sebagai makhluk konfliktis (*homo conflictus*), dimana *survival of fittest* (yang kuat adalah pemenangnya). Selama nafsu masih ada pada diri manusia, maka manusia menjadi makhluk yang suka atau penikmat konflik.

Susan (2009) menyebut bahwa manusia adalah makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan. Di dalam berinteraksi dengan makhluk lain, manusia tidak terlepas dari perbedaan kepentingan (*perceived divergent of interest*), dan dampaknya adalah adu kekuatan dari masing-masing persepsi. Persepsi yang kuat akan menang, dan yang lemah akan kalah. Maka terkadang sebuah konflik yang awalnya ringan bisa saja meningkat, menjadi sebuah ajang peperangan.

Tindakan konflik yang ditrepretasikan oleh setiap manusia modern sebagai organisme yang aktif, kreatif, dan independen, menuntun pada karakter manusia yang berpikir bebas, tidak mau dipaksa, anti mainstream, serta dapat bergerak cepat. Dengan dukungan teknologi dan media sosial menambah eskalasi konflik semakin meningkat, dan menciptakan fenomena tentang manusia yang cenderung semaunya sendiri (*desire to selfish*).

Manusia Selfish adalah manusia yang memiliki sikap sangat sensitif terhadap apa yang kontradiktif dengan kepentingannya, dan menunjukkan bahwa diri dan kelompoknya adalah paling benar, sedangkan orang atau kelompok lain salah. Nafsu untuk menang seperti halnya *animal power*, dimana menggunakan cara-cara binatang untuk memperjuangkan kepentingan mereka, yaitu dengan cara-cara yang jauh dari nilai dan norma agama serta budaya yang mengagungkan kebaikan, keindahan dan keserasian sosial serta perdamaian.

Konflik yang disebabkan oleh sentimen individu dan kelompok telah terjadi diberbagai tempat di Indonesia, yang didominasi oleh faktor suku, agama, ras dan kelompok atau

golongan. Kekerasan komunal mengemuka dimulai sejak masa transisi didaerah Ambon, Maluku Utara (Duncan, 2009), Papua, Poso Sulawesi Tengah yang berbasis agama, serta di Sambas Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, berbasis suku, di Pilkada DKI Jakarta yang berbasis etnis dan agama.

Fakta dinamika manusia di era sekarang, yang telah mengalami pergeseran, secara kualitas harus dipahami secara mendalam dan teliti. Konflik harus dimaknai secara menyeluruh, agar pemahaman, dan penyelesaian dapat dilakukan secara tepat. Konflik tidak lagi hanya dilihat dari satu sudut pandang, sebagaimana pendekatan klasik, atau dengan hanya dengan resolusi berbasis hukum karena konflik sudah bergeser kepada sensitifitas manusia, yang cenderung semaunya sendiri.

Eitzen (1986) mengemukakan tentang upaya penyelesaian masalah sosial dengan dua pendekatan, yaitu *person blame approach* dan *system blame approach*. Kedua pendekatan tersebut merujuk pada unit analisis masalah, individu dan sistem. Mayoritas kasus setiap penyelesaian masalah menggunakan *system blame approach*, baik dengan kebijakan maupun dengan pendekatan hukum. Sebagai contoh konflik pabrik semen di Pati, tawuran remaja sekolah, atau konflik antar kelompok agama di Surakarta.

Pendekatan individu sebagai upaya penyelesaian konflik sosial dapat dilakukan dengan mendiagnosa secara mendalam. Faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik, baik dari konten sosial, politik, ekonomi dan budaya serta karakter menjadi domain pendekatan individu. Pendekatan individu harus digunakan di dalam penyelesaian konflik di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Jika melihat dinamika saat ini, dimana manusia berada dalam kondisi sensitifitas tinggi, maka pertama yang harus dilakukan dalam menganalisis sebuah konflik adalah dengan pendekatan individu dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan syistem, atau menggabungkan keduanya disebut *person-system blame approach*.

Pemetaan konflik adalah langkah awal untuk membangun sistem pencegahan, penanganan konflik, serta menentukan penyelesaian konflik. Pemetaan konflik menurut Fisher (2001)

adalah langkah teknis yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Wehr dan Bartos dalam Susan (2009), memberikan teknik pemetaan konflik, yaitu *specify the context* (konteks konflik), *identify of parties* (aktor konflik), *separate cause from consequences* (sebab sebab konflik), *separate goal of interest* (tujuan konflik), *understand of dynamic* (dinamika konflik), *search for positive function, understand for regulation potential* (regulasi yang digunakan). Dinamika konflik dari Wher dan Bartos, dengan menyebutkan tahapan dinamika konflik, yaitu pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.

KONFLIK SOSIAL

Secara structural, konflik dibagi menjadi tiga level, yaitu konflik struktural fungsional, konflik modernisasi kritis, dan konflik dominasi kritis. Ketiga level konflik digunakan untuk memahami pengertian konflik berdasarkan kepentingan dan aktor yang terlibat didalamnya, serta menyesuaikan dengan era dimana proses kehidupan berlangsung, yaitu era klasik, modern dan post modern. Era klasik adalah era dimana masyarakat lebih memilih konsensus atau kompromi sebagai alat kontrol konflik, era modern konflik pada masyarakat industrialisasi, serta modernisasi pengetahuan yang makin meningkat, sedangkan era post modern adalah era yang mengedepankan nalar pemikiran modern yang diiringi dengan globalisasi teknologi, dimana masyarakat dapat bertindak sebagai makhluk bebas berpikir, bebas berekspresi, dan anti mainstream, serta menyukai tantangan ekstrem.

Para tokoh di era klasik seragam berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang disfungsional, dikarenakan dapat melukai, memperburuk, memperkeruh sistem sosial. Era klasik mengklaim dengan era keseimbangan, dimana sistem memiliki tingkat soliditas dan solidaritas yang kokoh, sebagaimana gambaran sistem organik yang saling bekerja sama, dan saling berkesinambungan antar satu subsistem dengan lainnya. Meskipun secara samar, mereka tetap mengakui dengan menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang lazim dalam proses kehidupan, namun

menurut mereka konflik dapat dikontrol dengan menggunakan pendekatan sistem yang mengikat, dengan tujuan menjaga integritas sosial dan keserasian sosial.

“Functionalist, as we seen, look at societies and sosial institutions as sistem in which all the parts depend on each other and work together to create equillibrum. They do not deny the existence of conflict; but the society develops way to control it, and it is that analyze. Conflict theorists perception of society could hardly more different. Where functionalists see interpedence and unity in society. Conflict theory see and area in which groups fight for power and the control of conflict simply means that one group is able, temporarily, to suppress its rivals. Fuctionalist see civil law, for example as way to increasing sosial integration but conflict theorists see civil law as a way of defining at the expense of others”. (Wallace and Allison, 1986).

Ketaatan masyarakat berdasarkan pada nilai dan norma, yang menjadi alat konsensus, alat toleransi dan alat kerjasama, sehingga masyarakat terbentuk dalam sistem yang equilibrium dan seimbang (Puryanto, 2018). Norma dan nilai sangat penting dalam setiap konsensus, karena nilai selalu berhubungan dengan kepentingan manusia. Konsensus menjadi dasar atas norma dan nilai, apabila diabaikan maka yang terjadi adalah sistem yang sudah terintegrasi akan saling terganggu dan akan menimbulkan konflik, Dahrendrof (1968) menyebut *consensus* sebagai kompromi.

Consensus berdasarkan sistem yang mengikat menurut Dahrendrof (1968) justru berbanding terbalik, bahwa masyarakat sebagai sistem lebih dicirikan oleh konflik daripada konsensus. Konflik di era modern mencuat kedalam bentuk konflik antar kelas, antara kelas bawah dan kelas atas, kelas atas dengan kelas atas, dan kelas bawah dengan kelas bawah. Pendapat Dahrendrof seiring dengan pendapat Marx, bahwa sistem yang korup telah menjadi sebab terjadinya konflik antar kelas, dikarenakan Marx melihat

bahwa sistem telah membuat tingkat kesenjangan antar kelas semakin menonjol. Konflik kelas terjadi dikarenakan faktor kekuasaan dan kewenangan yang didalamnya ada kepentingan intersubjektif (*kongkalingkong*) aktor pemilik modal dan penguasa.

Konflik di era modern terjadi pada era dimana industrialisasi bergerak massif, dan didorong oleh persaingan antar pemilik modal, dan berimbas pada kelas pekerja. Masa itu disebut era developmentalisme, dimana modernisasi dan kapitalisasi menjadi ikon. Konflik developmentalisme bertujuan penguasaan sumberdaya alam, serta sumber daya manusia. Sifat kapitalisme yang dilakukan oleh kelompok borjuis sebagai pemilik modal, sedangkan kaum proletar bekerja demi kelangsungan hidup mereka.

Konflik di era modern juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang semakin tinggi. Banyaknya sarjana yang dihasilkan dari institusi pendidikan, mencetak banyak ilmuwan-ilmuwan yang menolak berbagai bentuk dominasi, baik ekonomi, sosial dan politik, sebagai bentuk kemerdekaan berpikir dan berkreasi, serta berinovasi. Di tengah tingkat persaingan yang tinggi, dengan didukung pengetahuan, konflik semakin tidak terhindarkan lagi. Gesekan, persengketaan, serta pertikaian menjadi karakter konflik di era modern.

Individu sebagai aktor konflik dapat menjadi radikal, tidak terkontrol. Sebagaimana gambaran Herbert Marcuse (2010) bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang represif tanpa ampun. Penerimaan dan konformisme atas status quo secara perlahan lahan, yang dipaksakan oleh masyarakat modern adalah suatu totalitariansime. Sangatlah sulit bagi individu untuk mengambil jarak secara kritis terhadap sebuah masalah. Kebebasan berpikir, berbicara dan kehendak hati seperti usaha usaha bebas yang berperan dalam meningkatkan dan melindungi secara essensial merupakan pemikiran kritis yang di desain untuk menggantikan suatu kebudayaan material dan intelektual yang telah disesuaikan dengan suatu kebudayaan yang lebih produktif.

Secara umum, terminologi konflik adalah hal yang kontradiktif, berbeda, bersinggungan, bertolak belakang,

berlawanan dan atau berbenturan, baik antar individu, individu dengan kelompok, dan atau kelompok dengan kelompok. Konflik dapat meningkat dengan bentuk persengketaan, perseteruan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial memberi pengertian bahwa Konflik Sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik juga bisa menjadi sangat ekstrem dengan berakhir pada pertikaian, perang, dan menimbulkan korban baik harta benda, dan atau nyawa manusia.

Faktor Penyebab Konflik

a. Perbedaan persepsi dan kepentingan yang tidak terpenuhi

Pruit dan Rubin (2009) menyebut bahwa penyebab konflik terjadi dikarenakan adanya persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergent of interests*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak konflik tidak dapat tercapai secara simultan, Persepsi di antara pihak pihak konflik tidak sinkron, saling bertolak belakang, dan atau saling tidak mau menerima aspirasi dari pihak lain, serta masing masing pihak tetap bersikukuh dengan pandangan yang saling membenarkan satu sama lain.

Perbedaan persepsi dan kepentingan dapat terjadi diantara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Hal ini terjadi karena setiap manusia memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda dan harus terpenuhi,—Semakin tinggi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat menyebabkan tingkat gesekan dan pertentangan semakin tajam.

Peningkatan kebutuhan manusia dapat ditengarai oleh tingginya tingkat pengetahuan dan menciptakan pemenuhan kepentingan ekonomi, sosial dan serta kepentingan politik agar selalu terpenuhi, maka dari itu dampaknya adalah konflik semakin meningkat dan menjadi destruktif. Sebagaimana Puryanto dkk,

(2018) tentang konflik sosial disebabkan karena adanya peningkatan kompetensi pengetahuan manusia, yang didalamnya menyangkut tentang paradigm, kepentingan serta kewenangan dan kekuasaan, sehingga menyebabkan kondisi konflik semakin pelik atau laten, dikarenakan setiap individu kokoh pada pandangan yang dimiliki.

b. Kesenjangan dan Ketidakadilan Sosial

Perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh kondisi pada masa revolusi industri mengungkap tentang gambaran kesenjangan dan ketidakadilan bagi kelas proletar sebagai kelas pekerja dengan kelas pemilik kekuasaan, kewenangan dan pemilik modal. Kesenjangan menciptakan dua kelas superior dan subordinasi yaitu yang kaya dan yang miskin, yang menang dan yang kalah, Negara dengan rakyat, dan atau atasan dengan bawahan.

Faktor keadilan dan kesenjangan sosial menjadi pemicu konflik di era modernisasi, dimana faktor industrialisasi, kekuasaan dan pemilik modal memiliki komitmen yang sama yaitu kapitalisasi ekonomi. Persaingan diantara komponen tersebut menciptakan konsep kolusi, korupsi dan nepotisme. Keadilan dan kesenjangan menjadi penyebab konflik di era sekarang makin massif, disamping faktor globalisasi media sebagai instrumen juga didukung oleh faktor tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, yang menggunakan pendekatan keadilan secara ideal.

c. Perbedaan suku, agama, ras, dan kelompok atau golongan

Meskipun hidup di dalam Negara demokrasi Pancasila, yang mengedepankan etika bernegara, namun persoalan klasik yaitu perang identitas masih mendilema di dalam masyarakat Indonesia. Gambaran konflik identitas di era sekarang, baik persoalan suku, agama, kelompok atau golongan masih massif di Indonesia hingga saat ini. Konflik identitas semakin hijau lurus, disamping faktor kepentingan juga ditandai dengan kebebasan partai politik sebagai representasi dari demokrasi.

Indonesia sebagai Negara beragam terbesar di dunia memiliki tantangan yang besar hingga saat ini. Tantangan yang dimiliki adalah berkaitan dengan konflik identitas dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan kelompok atau golongan. Gambaran konflik antar suku di Kalimantan, konflik Ras di Papua, konflik antar aliran kepercayaan Sunni dan Syiah, menambah deretan konflik berbau SARA di Indonesia.

d. Diskriminasi HAM

Memperjuangkan hak di era globalisasi dan modernisasi teknologi menjadi stimulus tercapainya tujuan demokrasi. Sebagai Negara demokrasi yang mengedepankan jaminan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial pada setiap individu, serta hak setiap warganya untuk memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan politik, serta kedudukan yang sama dimata hukum. Konflik akibat dari diskriminasi HAM dapat terjadi pada konflik lahan sawit, konflik deforestasi hutan, konflik kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan si miskin, serta diskriminasi terhadap hak-hak anak, wanita, dan kaum lemah.

e. Karakter

Karakter merupakan sumber konflik utama di era sekarang, dimana karakter sering menjadi trending topik pada setiap konflik. karakter mau menang sendiri, penguin benar sendiri, tidak menghargai, tidak mengakui menjadi sumber konflik baru yang berbasis karakter. Banyak kasus konflik yang bersumber dari karakter, misalnya konflik agama dengan mengklaim benar sendiri, sebagai mayoritas mau menang sendiri, tidak mengakui tentang keberagaman agama lain dan budaya adat istiadat. Begitu juga dengan konflik suku, karakter yang kurang baik, seperti kurang bergaul, mau menang sendiri, eksklusif menjadi sebab konflik suku di Sampit Kalimantan Tengah

Bentuk Konflik Sosial

a. Konflik pribadi

Konflik pribadi terjadi pada setiap individu dengan individu yang lain. Konflik pribadi dapat terjadi dikarenakan perbedaan aspirasi, kepentingan, dan menyebabkan munculnya prasangka. Konflik pribadi dapat berbentuk konflik perorangan, antara teman dengan teman, dan konflik keluarga, serta konflik individu dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

b. Konflik antar kelompok

Konflik kelompok adalah konflik yang terjadi pada kelompok satu dengan kelompok lain. Konflik kelompok dapat berbentuk konflik antar kelompok pemuda desa dengan pemuda lainnya, tawuran pelajar sekolah, konflik geng motor, konflik antar gojek dan dept kolektor, konflik geng dept kolektor, konflik antar kelompok suku dengan suku lainnya, kelompok antara aliran agama satu dengan agama lainnya.

c. Konflik politik

Konflik politik biasa terjadi di era demokrasi, dimana pemenang kekuasaan berafiliasi dengan partai politik, sedangkan partai politik yang kalah berada pada jalur oposisi. Kebiasaan partai oposan memberikan kritik, dan saran kepada kekuasaan menjadi kontradiktif dengan partai yang mendukung kekuasaan. Konflik politik terjadi pada kontestasi pemilihan kepala desa, kepala daerah, gubernur dan Presiden, serta anggota DPRD/DPR/DPD

d. Konflik SARA

Konflik rasial bersumber dari perbedaan suku, agama, ras, dan kelompok atau golongan. Konflik rasial terjadi hingga saat ini, seperti pertentangan aliran agama Sunni dan Syiah, ormas FPI dan NU, Muhammadiyah, serta munculnya kelompok intoleran (radikal). Konflik rasial juga terjadi seperti ras Papua dan Jawa yang menimbulkan korban harta dan nyawa.

e. Konflik organisasi

Konflik organisasi biasanya terjadi karena faktor kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan kepentingan karyawan. Misalnya konflik antara buruh dengan manajemen perusahaan, konflik guru dengan kepala sekolah, dan konflik antara masyarakat

dengan penguasa dalam menentukan kebijakan yang tidak seimbang.

1. Dampak dan Cara Mengatasi Konflik Sosial

a. *Contending*

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Contending* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Tujuan *contending* adalah menghentikan kemampuan lawan untuk meneruskan konflik. Strategi *contending* dilakukan dalam bentuk intimidasi dan negoisasi. Negoisasi dapat dilakukan dengan persuasi, menjanjikan penghargaan, dan murni kerjasama. *Contending* dilakukan untuk memutus rantai konflik supaya dampak yang diakibatkan tidak semakin meluas dan melebar atau konflik bergerak *progressif*. *Contending* adalah strategi yang paling ekstrem didalam upaya penyelesaian masalah konflik. *contending* biasanya menggunakan pendekatan hukum untuk memaksa pihak konflik menyerah.

Problem Solving

Usaha mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak (*win win solution*). Pihak yang berkonflik berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Strategi *problem solving* bertujuan untuk menemukan kesepakatan bersama. Untuk melakukan strategi tersebut dapat menggunakan mediator (*safety valve*) atau katup penyelamat, yang dapat dilakukan oleh agen independen. Seperti kasus konflik semen di Pati dan Rembang, menggunakan mediator KLHS.

Problem solving adalah strategi yang digunakan didalam upaya penyelesaian konflik. Strategi ini menjalankan mekanisme perdamaian yang mengedepankan keuntungan bersama, seperti halnya konflik pembebasan jalan tol, yang menerapkan konsep *ganti untung*. Teknis dari *problem solving* ini adalah mengutamakan proses identifikasi, dimana hal itu dilakukan

adalah untuk mendapatkan sumber-sumber masalah konflik yang valid, serta siapa saja aktor yang memiliki kepentingan masalah konflik.

b. Yielding

Penyelesaian oleh para aktor konflik dapat menurunkan aspirasinya sendiri, dalam rangka mencari solusi, tanpa harus melakukan upaya penyerahan total. *Yielding* dilakukan demi kepentingan lebih baik dari sebuah konflik dengan mengedepankan aspek etika, atau posisi yang lebih tinggi. Strategi *yielding* dilakukan pada konflik struktural atau organisasi yang di dalamnya ada aktor dalam tingkat structural. Seperti konflik bawahan dengan atasan, yang dalam kasus kebijakan yang tidak berpihak pada bawahan, dengan strategi *yielding* yaitu bawahan mengutamakan etika moral, meskipun kebijakan atasan tidak berpihak kepadanya.

c. Withdrawing

Upaya menarik diri baik secara *temporary* atau permanen dengan alasan tertentu, dengan maksud menghentikan konflik dan mengharapkan perdamaian. Masing-masing aktor konflik menganggap bahwa konflik harus segera diakhiri, dengan menarik diri dari perang dengan tujuan mengurangi korban, dan dampak konflik tidak terlalu parah. Strategi *withdrawing* dipakai dalam konflik internasional, seperti perang antar Negara.

d. Pendidikan

Upaya untuk mempertemukan, dan menemukan penyelesaian konflik, serta mencegah konflik agar tidak terulang kembali, dengan tujuan keharmonisan dan keserasian sosial. Pendidikan kedamaian adalah upaya pendidikan di dalam mengutamakan keserasian sosial dengan mengutamakan karakter yang berbasis nilai agama dan budaya. Strategi penyelesaian konflik berbasis pendidikan lebih kepada pencegahan konflik yang dilakukan pasca konflik.

PETA KONFLIK FISHER

Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak

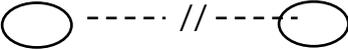
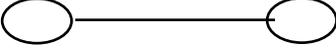
dengan masalah dan pihak lainnya (Muryanti. et al., 2013). Analisis pemetaan konflik juga berguna untuk melihat bagaimana melihat satu persoalan dari berbagai pihak yang berkonflik. Menurut Jamil (2007) melalui pemetaan konflik maka dapat diketahui secara mudah dan akurat hal-hal sebagai berikut:

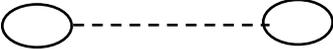
Identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik.

- Jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik.
- Berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik.
- Berbagai isu yang terlibat dalam konflik.
- Pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.

Pemetaan konflik dalam penelitian ini menggunakan kaidah-kaidah atau simbol-simbol tertentu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Simbol Pemetaan Konflik

Simbol	Makna
	Lingkaran menandakan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi; ukuran relatif= kekuasaan terhadap isu
	Garis putus-putus menandakan hubungan tidak resmi atau sementara
	Garis ganda yang menyilangi garis tunggal menandakan putusnya suatu hubungan
	Garis lurus yang menandakan hubungan yang dekat
	Tanda panah menandakan arah utama suatu pengaruh atau kegiatan
	Kotak segi empat menandakan isu atau topik-

	topik atau hal-hal lain selain orang
	Garis penghubung ganda menandakan suatu aliansi
	Garis turun naik seperti bola lampu menandakan perselisihan (konflik)
	Bayangan yang besar menunjukan pihak-pihak luar yang memiliki pengaruh namun tidak terlibat secara langsung

Sumber: Fisher (Muryanti, et al., 2013)

Sosialisasi adalah sebuah kegiatan pengenalan, pemahaman dan penghayatan terhadap suatu nilai, norma atau pola tertentu yang bekerja di dalam masyarakat, yang ditujukan kepada target kelompok tertentu. Sosialisasi ini menjadi sangat penting ketika nilai-nilai, norma-norma atau pola-pola yang ingin diperkenalkan dan dipahami dan diapresiasi kepada khalayak merupakan hal baru. Seperti halnya strategi penanganan konflik melalui budaya lokal untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling terintegrasi antara kelompok-kelompok dan individu.

SEJARAH KONFLIK

Secara budaya, Brebes merupakan kawasan unik di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan Brebes merupakan daerah pertemuan antara budaya Jawa dan Sunda. di bagian barat, sebagian masyarakat berbudaya Sunda. sementara di daerah timur, sebagian masyarakat berbudaya Jawa yang terpengaruh oleh subudaya Banyumas. Selain itu ada pula karakteristik kawasan utara yang bersifat heterogen. Begitu beragamnya budaya di Kabupaten Brebes mengindikasikan tingkat heterogenitas yang tinggi.

Heterogenitas yang tinggi di Kabupaten Brebes memiliki dua dimensi. Ia dapat menjadi model dalam komunikasi dan interaksi multicultural, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik. Terkait dengan heterogenitas sebagai sumber konflik, ini berhubungan

dengan terjadinya hambatan dalam mencapai konformitas antarkelompok masyarakat. Hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di Brebes terutama yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Pada tahun 2008, terjadi tawuran antara warga Desa Cikesual Kidul dan Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan. Puluhan warga kedua desa luka akibat bentrokan itu. Selain itu, sedikitnya 50 rumah warga Desa Cikesual rusak berat dan ringan. Bahkan, tiga rumah lainnya hangus dibakar warga Pamedaran. Tawuran yang dimulai usai salat Jumat baru berakhir petang tadi setelah seratusan pasukan keamanan, termasuk Brigade Mobil dari Kepolisian Wilayah Pekalongan tiba ke lokasi. Bentrokan terjadi di tengah persawahan yang membatasi kedua desa. Warga yang terlibat bentrokan menggunakan aneka senjata tajam. Mulai dari parang, golok, hingga ketapel.

Dalam empat tahun terakhir sejak 2011-2014, intensitas konflik di Brebes cenderung peningkatan. Hal ini tampak dari kuantitas terjadinya konflik, terutama konflik tawuran. Maraknya konflik yang terjadi dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media yang secara aktif meliput berbagai peristiwa di Brebes. Perkembangan internet sebagai media yang mudah diakses menjadi faktor yang mendorong banyaknya liputan dan pelaporan peristiwa konflik di Brebes. Dalam kajian yang dilakukan oleh tim peneliti, sejak tahun 2011 telah terjadi beberapa konflik. Konflik yang terbanyak terkait dengan tawuran antarwarga.

Konflik tawuran seolah menjadi ciri khas dari Kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan sejarah konflik di Kabupaten Brebes erat kaitannya dengan konflik. Oleh karena itu, tawuran seakan lekat dengan masyarakat di Brebes. Ditinjau dari aspek penyebabnya, cenderung disebabkan ketegangan antarkelompok sosial yang mudah terpicu hanya karena faktor-faktor yang remeh. Di Kecamatan Kersana, tawuran disebabkan oleh adanya pertikaian yang diawali dari hiburan dangdut. Diduga akibat saling bersenggolan pada saat berjoged, terjadi cekcok antarwarga. Kemudian, Di Kecamatan Ketanggungan, terdapat tawuran yang disebabkan oleh ketidaksenangan dari warga Desa Dumeling

ketika sekelompok warga Desa Kertabasuki melakukan takbir keliling yang dianggap mengganggu ketenteraman warga. Selain itu, di Kecamatan Losari tawuran disebabkan oleh saling mengejek antarwargadesa, kemudian merembet ke aksi brutal seperti pelemparan petasan yang dilakukan antarwarga.

Selain itu di Bulakamba yaitu Desa Tegalglagah, di Bantarkawung yaitu Desa Pengarasan, di Kecamatan Larangan yaitu Desa Kamal dan Pamulihan, di Kecamatan Ketanggungan yaitu Desa Cikeusal Lor dan Cikeusal Kidul, di Kecamatan Songgom yaitu Desa Songgom, di Tonjong yaitu Desa Kalinusu dan Linggapura, sedangkan di Kecamatan Wanasari yaitu Desa Pebatan, sering terjadi tawuran warga atau pengeroyokan. Biasanya, tawuran atau pengeroyokan dipicu oleh persoalan sepele, seperti masalah pacaran dan senggolan saat menonton musik dangdut.

Konflik yang dipicu persoalan kerbau liar, seperti terjadi antara Desa Songgom di Kecamatan Songgom dan Desa Pamulihan di Kecamatan Larangan, jarang terjadi. Rais menambahkan, selama ini waktu rawan konflik terutama pasca-perayaan hari raya Idul Fitri. Saat itu, para pemuda kampung yang sebelumnya merantau pulang ke daerah masing-masing. Mereka membawa budaya kota besar yang tidak semuanya sesuai dengan budaya lokal. Berbagai konflik yang terjadi, persebaran konflik terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes. Kecamatan tersebut adalah Kersana, Wanasari, Ketanggungan, dan Losari. intensitas paling tinggi adalah di Kecamatan Ketanggungan yang mencapai lima konflik.

Sebagian besar konflik yang terjadi disebabkan oleh hal sepele yang dilakukan oleh pemuda. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor sumber daya manusia. Mudahnya kelompok masyarakat tersulut emosi menjadi indikasi masih adanya masalah dalam aspek sumber daya manusia. Lemahnya sumber daya manusia disebabkan oleh faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Di Kabupaten brebes, data yang dihimpun oleh BPS pada tahun 2013 menjelaskan bahwa sebanyak 152.205 KK atau 28,87% termasuk kategori keluarga prasejahtera.

Potensi konflik pertama adalah konflik sumber daya ekonomi. Peristiwa pertama adalah ketika ratusan warga Desa Pamulihan bersiap menggeruduk warga Dukuh Bajangan pada November 2011. Senjata tajam yang digunakan seperti parang, arit, dan golok. Upaya tersebut berhasil digagalkan oleh polisi. Konflik yang melibatkan kedua desa itu, berawal dari persoalan kerbau liar. Sejak lebih dari 10 tahun lalu, warga di Desa Songgom mengeluhkan adanya serangan kerbau liar pada tanaman mereka di sawah. Serangan kerbau mengakibatkan petani di Songgom selalu gagal panen. Kerbau-kerbau tersebut milik warga Pamulihan.

Peristiwa kedua dari konflik sumber daya ekonomi terjadi pada 27 Desember 2012. Ribuan warga Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir KM 264 Tol Pejagan Brebes, menagih janji keluarga Bakrie untuk segera menyelesaikan jembatan Desa. Hal ini dilatarbelakangi terputusnya akses menuju desa karena jalan yang tertutup oleh jalan tol.

Potensi konflik agama di Brebes misalnya seperti yang terjadi di Kecamatan Salem. Kecamatan ini jauh dari jangkauan dan pantauan pemerintah kabupaten, sehingga terdapat beberapa potensi konflik yang berkembang. Di daerah tersebut terdapat aliran Aliran Perguruan Mahesa Kurung Al Mukaromah. Aliran ini telah dianggap sesat oleh MUI Bogor. saat ini keanggotaan aliran tersebut sedang berkembang dengan jumlah 100 orang Selain itu terdapat pula Aliran Putra Gunung Kumbang. Aliran ini sedang berkembang di Bogor. Aliran ini menarik sejumlah uang dari anggotanya. Di daerah ini minim pantauan dari pihak pemerintah karena lokasinya yang jauh, sehingga kemungkinan berkembang aliran lain dapat terjadi. Selain itu di Kecamatan Songgom terdapat Kelompok mbah Suro. Kelompok ini diindikasikan menyelewengkan syariat Islam yaitu aliran yang berkedok Thoriqoh disinyalir melakukan penyimpangan-penyimpangan. Aliran sesat ini di pimpin oleh K.H. Ahmad Fauzi Cs., sebagai ketua aliran Mbah Syuro di Kabupaten Brebes, dan aliran sesat ini bersumber dari aliran Mbah Suro, dari Puger Jember Jawa Timur.

Konflik tawuran yang terjadi diselesaikan dengan musyawarah mufakat: pertemuan antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga. Namun demikian, terdapat pula konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Beberapa aktor perdamaian yang dominan dalam penyelesaian masalah konflik adalah (1) pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa; (2) tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan sesepuh warga; (3) pihak kepolisian dan militer. Peran pihak pemerintah dalam penyelesaian konflik terletak pada fungsi sebagai mediator, penyerap aspirasi, dan penentu kebijakan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewenangan teknis dalam menengahi masalah dan memberikan solusi.

Peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik tampak pada fungsinya sebagai penyelarass dalam struktur budaya masyarakat. Sebagai *social balancing*, tokoh masyarakat berperan menengahi permasalahan dan menghubungkan pihak-pihak bertikai. Tokoh masyarakat berperan dalam memberikan pemecahan alternatif, seperti pengajian dan mujahadah. Peran TNI dan Polri lebih mengarah pada pencegahan dan penanganan masalah. Dalam hal ini apabila terjadi kerusuhan, TNI dan Polri berperan dalam menghentikan konflik terutama dalam tindakan dan aspek penegakan hukum.

Sosialisasi dan budaya desa dalam membangun ketahanan dan membangun kebersamaan serta mengantisipasi terjadinya konflik di Desa Cikeusal Kidul. Dijelaskan bahwa di Desa Cikeusal Kidul terdapat banyak konflik yang terjadi dan berlarut-larut selama berpuluh-puluh tahun dengan adanya konflik tersebut membuat kepala Desa Cikeusal Kidul berpikir untuk membawa perubahan yang baik bagi Cikeusal Kidul, baik itu berupa tatanan pemerintahan yang baik, cara berpolitik, sosialisasi masyarakat, dan berbudaya serta berkehidupan yang baik. Berdasarkan pemikiran tersebut muncul inisiatif dari kepala Desa Cikeusal Kidul dengan melaksanakan politik praktis. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa Cikeusal Kidul melaksanakan janji-

janji politis yang disampaikan sebelum menjadi kepala desa, yakni memberikan rasa nyaman dan aman dalam masyarakat Desa Cikeusal Kidul, revitalisasi lahan pertanian, dan revitalisasi pasar.

Desa Cikeusal Kidul terdapat budaya lokal yang mampu mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, yaitu budaya “tegur, sapa, dan salam”. Dalam pelaksanaannya, budaya ini dilaksanakan setiap Raya Idul Fitri. Budaya “tegur, sapa, dan salam” ini dapat berupa bersama-sama masyarakat Desa Cikeusal Kidul pergi ke desa tetangga untuk melakukan silaturahmi dengan berjalan kaki jika desa yang dituju jaraknya dekat kemudian dalam perjalanan tersebut diiringi dengan bacaan sholawat dari masyarakat Desa Cikeusal Kidul. Budaya ini merupakan salah satu budaya yang baik, yang mana dapat membuat seseorang belajar akan artinya rasa syukur dan rasa kebersamaan. yang dilakukan setiap lebaran idul fitri dan bulan muharram. Budaya ini memaknai arti tegur sapa salam dengan silaturahmi yang sesungguhnya, berkeliling ke desa-desa dengan berjalan kaki sambil sholawatan dan saling maaf-maafan, namun keikutsertaan anak muda dalam kegiatan desa ini sangat sedikit bahkan tidak mencapai 50% dari jumlah keseluruhan penduduk yang berusia remaja.

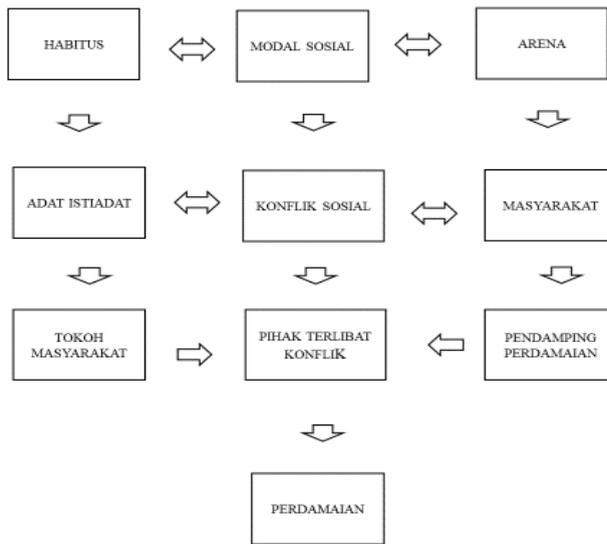
Konflik yang ada di Desa Cikeusal Kidul tentunya terdapat pihak asing yang ini menghancurkan Desa Cikeusal Kidul. Konflik di Desa Cikeusal Kidul dari tahun ketahun memang sudah ada konflik, dikarenakan ada orang dari luar sekaligus orang dari dalam yang ingin menghancurkan pemerintahan Desa Cikeusal Kidul. Selain itu adanya konflik disebabkan karena kurangnya kegiatan dan kepercayaan dari pihak instansi atau orang tua sendiri sehingga dapat membuat anak menjadi jenuh dan merasa salah sehingga timbul konflik. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi konflik dalam ranah anak muda yaitu pemberian kegiatan kepada pemuda yang nantinya pemuda tersebut dapat melaksanakan amanat dengan penuh tanggungjawab.

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK MELALUI BUDAYA LOKAL

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, dapat disusun sebuah model strategi konflik berbasis budaya lokal.

Beberapa unsur yang ada dalam manajemen berbasis budaya lokal dengan menggunakan teori yang digagas oleh Bordieu dengan beberapa indikator yang ada di dalamnya adalah Modal Sosial, Habitus dan Arena. Modal sosial yang dimaksud adalah segala sesuatu yang melekat pada individu atau masyarakat, bisa berupa status sosial, status ekonomi, suku, etnis dsb. Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik modal sosial bisa menjadi faktor yang positif mendorong penyelesaian konflik. Secara logis modal sosial yang melekat pada diri individu mempengaruhi individu untuk bertindak positif. Indikator berikutnya adalah Habitus, arti habitus dalam konteks ini adalah pembiasaan. Berkaitan dengan penyelesaian konflik elemen Habitus harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan konflik. Unsur-unsur habitus dalam hal ini meliputi adat istiadat, budaya, ideologi, agama dsb. Dengan sendirinya dalam menyelesaikan konflik faktor agama, adat istiadat harus dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam menyelesaikan konflik. Indikator yang terakhir adalah arena. Arena yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat.

Lingkungan masyarakat menjadi faktor yang penting dalam menyelesaikan konflik. Mengingat di lingkungan masyarakat ada nilai dan norma yang harus dipatuhi. Disamping ada nilai dan norma, di lingkungan masyarakat juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat, yang berperan sebagai pihak ketiga yang akan menyelesaikan konflik. Nilai dan norma dalam masyarakat juga jadi pedoman atau referensi dalam menyelesaikan konflik. Tiga indikator Habitus, Arena dan modal sosial harus terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam menyelesaikan konflik. Apabila ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi dimungkinkan tidak akan terjadi penyelesaian konflik, tetapi justru sebaliknya konflik menjadi berkepanjangan. Untuk lebih jelasnya model penyelesaian konflik berbasis budaya lokal dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1.



MODEL PENYELESAIAN KONFLIK
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Gambar 3.1. Model Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal

Simpulan

Organisasi IPNU-IPPNU dan karang taruna memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat bagi anggota serta masyarakat Cikeusal Kidul, mulai dari marhaban keliling mingguan, rapat triwulan, rutinan tahunan, dan pengamanan masyarakat. Organisasi ini memiliki peran dalam menciptakan perdamaian antara desa Cikeusal Kidul dan Cikeusal Lor. Dengan adanya organisasi tersebut dapat membuat warga menjadi lebih produktif dan membuat minat yang dimiliki dapat disalurkan dengan baik sehingga mampu meminimalisasi konflik yang terjadi pada antar desa tersebut. Kegiatan-kegiatan positif tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan warga desa Cikeusal Kidul dan Cikeusal Lor yang pada awalnya berselisih menjadi lebih harmonis. Kegiatan tersebut adalah Marhaban keliling mingguan yang dilakukan setiap

malam jumat di setiap mushola yang ada di Desa Cikeusal Kidul. Kegiatan marhaban mingguan ini boleh diikuti oleh umum, rapat triwulan merupakan rapat evaluasi tentang kegiatan, keuangan, dan konflik yang terjadi dalam Badan Otonom (Banom) yaitu Muslimat, Ansor, Fatayat dan IPNU-IPPNU. Rapat dipimpin oleh pengurus ranting NU Cikeusal Kidul, kegiatan rutin tahunan yang diadakan setiap satu tahun sekali pada satu bulan Maulid yang dilakukan ranting oleh Cikeusal Kidul dan Cikeusal Lor. Kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara desa tersebut khususnya di kalangan anak muda dan mengenalkan Nahdatul Ulama kepada masyarakat. IPNU bekerja sama dengan Banser untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Ciekusal Kidul dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Pengamanan dilakukan satu minggu sebelum hari Raya idul fitri dan tahun baru islam IPNU dan banser bersama-sama berkeliling ke setiap pelosok desa Cikeusal Kidul untuk menertibkan masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang negatif seperti berjudi dan mabuk-mabukan yang dapat memicu konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A., Mohd, M.A., & Abdul, R.A., 2014. Culturally-responsive Strategies for Resolving Social Conflict in Rural Community. *Mediterranean Journal of Social Social Sciences*, 5(20), pp.375-385.
- Arsal, T., & Setyowati, L.D., Hardati, P., 2021. Analysis of Conflict Management Strategy in Social-Disaster Prone Community. In *6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*, pp.329-333. Atlantis Press.
- Dahrendrof, R., 1968. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford, CA:
- Eitzen, S.D., 1986. *Social Problem*. Boston, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon Inc,
- Jamil, M., 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi Dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre. (WMC).
- Fisher, S., dkk. 2001. *Manajemen Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council

- Marcuse, H., 2010. *Manusia Satu Dimensi*. Pustaka Prometha. Jakarta.
- Muryanti., dkk., 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ode, S., & Rachmawati, N.A., 2017. Peran Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Konflik. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), pp.103-119
- Puryanto, S., 2018 Persepsi Masyarakat Millennial terhadap Makna Konflik. *Jurnal Terapung*, 1(1).
- Putra, M.G.B.A., 2013. Peran Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Keyakinan Beragama di Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26, pp.1-14.
- Susan, N., 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana.
- Susan, N. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.
- Van-der-Zee, K.I., & Hofhuis, J., 2018. Conflict management styles across cultures. *The International Encyclopedia of Intercultural Communication* [Internet]. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Wallace, A.R., & Allison W., 1986. *Contemporary Sociological Theory, The Continuing Classical Tradition*. Second Edition. New Jersey, Prentice Hall, Inc. Engewood Cliff
- Widiyowati, E., Kriyantono, R., & Prasetyo, B.D., 2018. Model Manajemen Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Konflik Perguruan Pencak Silat di Madiun–Jawa Timur. *Komunikator*, 10(1), pp.34-47.